

Warga Batang Tolak Aksi Anarkistis

■ Gelar Deklarasi Damai

BATANG - Elemen masyarakat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batang menggelar Deklarasi Damai yang berlangsung di alun-alun. Aksi itu dilakukan dalam menolak segala bentuk anarkistis dalam penyampaian aspirasi.

Hadir dalam acara itu Bupati Batang Wihaji, Ketua DPRD Maulana Yusup, Dandim 0736 Letkol Inf Dwison Evianto, Kapolres AKBP Edwin Louis Sengka. Tampak juga Ketua MUI KH Zaneal Iroqi, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Subchi, dari ormas Aisyiyah, Fatayat NU, FKPPi, Pemuda Pancasila dipimpin Ketua PWC Sodiq, Komando Kesiapan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), Pemuda Muhammadiyah, Banser,

IPNU-IPPNU, serta OSIS, dan lainnya.

"Kami apresiasi acara yang diinisiasi Kapolres hari ini menggelar aksi tokoh masyarakat menolak anarkhis yang unjuk rasa yang bertentangan dengan undang-undang. Negara kita negara hukum dan demokrasi, maka kita hormati sikap perbedaan pendapat," tandas Bupati Wihaji.

Dia menuturkan, ada perbedaan sikap dan pendapat itu hal biasa. Namun agar bisa diselesaikan melalui

upaya-upaya damai.

"Poin pentingnya aksi deklarasi adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar dan Forkopimda, sepakat menolak sikap - sikap anarkisme yang dapat merugikan kita sendiri. Intinya Batang harus guyub rukun."

Memantau Situasi

Ketua DPRD Maulana Yusup menegaskan, Dewan masih tahap memantau situasi kebijakan atau kewenangan Pemerintah Pusat-DPR RI.

Selanjutnya menunggu aturan turunannya apakah Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

"Dalam kelembagaan kami tidak bisa menyimpulkan. Karena belum mengkaji jadi harus ada kajian dulu," katanya.

Kapolres Batang AKBP Edwin Louis Sengka menegaskan, aksi

penolakan Undang-undang Omnibus Law di Batang kondusif. Semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku

"Alhamdulillah aksi berlangsung kondusif, tetapi kami tetap antisipasi jangan sampai nanti ada penyusup yang tidak bertanggungjawab mengganggu keamanan ketertiban masyarakat."

Deklarasi mencerminkan warga Batang secara keseluruhan menolak unjuk rasa yang sifatnya anarkis.

"Undang - undang nomor 9 tahun 1998 sudah mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, tapi harus dilakukan dengan yang baik," tegasnya.

Dandim 0736 Letkol Dwison Evianto, pihaknya akan selalu mem-backup kepolisian dalam pengamanan dan penyamaan aspirasi masyarakat. (ar-65)